

TINJAUAN YURIDIS  
TENTANG CYBER CRIME  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 258/PID.S/2012/PN.SBY)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :  
JOKO WIRATMONO  
NPM. 0871010071

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2013

# HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TENTANG CYBER CRIME  
(Studi Kasus Keputusan Nomor : 258/PID.S/2012/PN.SBY)

Disusun Oleh:

JOKO WIRATMONO  
NPM. 0871010071

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

SUBANI, S.H., M.Si.  
NIP. 19510504 198303 1 001

Mengetahui,  
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro,SH,MM.  
NIP 19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI  
TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK TERKAIT (NEIGHBORING RIGHTS)  
ATAS IKLAN YANG TELAH DISIARKAN MELALUI RADIO  
Oleh:

BRILIAN ARDANA RISWARI  
NPM. 0871010082

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur  
Pada Tanggal : 31 Januari 2013

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Tim Penguji  
1.

Mas Anienda Tien.F, SH, MH.  
NPT. 37709070223

Hariyo Sulistiyantoro SH.,MM.  
NIP 19620625 199103 1 001  
2.

Fauzul Aliwarman,SH,I,M.Hum.  
NPT 3 8202 07 0221

3.

Yana Indawati,SH., M.Kn.  
NPT 3 7901 07 0223

Mengetahui,  
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro,SH.,MM.  
NIP 19620625 199103 1 001

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI  
SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK TERKAIT (NEIGHBORING RIGHTS)  
ATAS IKLAN YANG TELAH DISIARKAN MELALUI RADIO**

Oleh:

**BRILIAN ARDANA RISWARI**  
NPM 0871010082

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada Tanggal : 31 Januari 2013

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Tim Penguji

1.

Mas Anienda Tien.F, SH, MH.  
NPT. 37709070223

Hariyo Sulistiyantoro SH.,MM.  
NIP 19620625 199103 1 001  
2.

Fauzul Aliwarman,SH.I.M.Hum.  
NPT 3 8202 07 0221

3.

Yana Indawati,SH., M.Kn.  
NPT 3 7901 07 0223

Mengetahui,  
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro,SH.,MM.  
NIP 19620625 199103 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Joko Wiratmono  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 20 September 1990  
NPM : 0871010071  
Konsentrasi : Pidana  
Alamat : Jl.Purwodadi II/88 Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS TENTANG CYBER CRIME (Studi Kasus Putusan Nomor : 258/PID.S/2012/PN.SBY)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

Surabaya, 10 Juni 2013  
Penulis

- Subani, S.H., M.Si.  
NIP. 19510504 198303 1 001

Joko Wiratmono  
NPM. 0871010071

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayahNya, sehingga dengan izinNya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Cyber Crime” (Studi Kasus Putusan Nomor : 258/PID.S/2012/PN.SBY).

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan sarjana hukum program studi Strata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Disamping itu juga penulis dapat menjadikan wawasan tambahan sekaligus pembandingan antara teori-teori yang telah diterima dengan keadaan yang sebenarnya.

Sebagai mahasiswa dan calon Sarjana Hukum tak henti-hentinya penulis haturkan banyak terima kasih atas segenap saran, motivasi dan kerelaan bantuan dari berbagai pihak, Maka pada kesempatan kali ini dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati dari penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistyantoro, SH., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, SH., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs.Ec. Gendut Sukarno, M.S selaku Wakil Dekan II Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Subani, SH., M.Si selaku Ketua Program Studi dan Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis untuk lebih teliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi..
5. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya beserta staf yang telah membantu penulis selama dalam penelitian.
6. Bapak dan Ibu Dosen selaku Ketua Tiem penguji Sripsi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Kedua orang tua tercinta Bpk. Soeharto dan Ny.Chotimah, beserta teman saya Firdaus, Brilian, Andina, Diswo, Danu, Sri Endang, Diana, Halimah. yang telah banyak memberikan dukungan motivasi berupa moril serta doa restunya selama ini kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan guna memperbaiki serta menyempurnakan penyusunan selanjutnya, sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, Juni 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI ..	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
ABSTRAKSI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Manfaat Praktis .....	9
1.4.2 Manfaat Teoritis .....	10
1.5 Kajian Pustaka .....	10
1.5.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	10
1.5.1.1. Pengertian Delik .....,	10



1.5.1.2. Unsur-Unsur Delik.....	14
1.5.1.3. Pengertian Kesengajaan atau Dolus.....	17
1.5.1.4. Bentuk-bentuk Kesengajaan (Opzet or Intention)..	18
1.5.2. Tinjauan Umum tentang Cyber Crime .....	23
1.5.2.1. Pengertian Cyber Crime .....	23
1.5.2.2. Unsur-unsur Cyber Crime .....	26
1.5.2.3. Subjek Hukum Cyber Crime.....	26
1.5.2.4. Objek Hukum Cyber Crime.....	27
1.5.2.5. Karakteristik Cyber Crime .....	27
1.5.3. PertanggungJawaban Pidana.....	28
1.6 Metodologi Penelitian .....	34
1.6.1. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian.....	34
1.6.2. Sumber Bahan Hukum dan/atau Data .....	35
1.6.3. Pengumpulan Bahan Hukum dan/atau Data.....	36
1.6.4. Tehnik Analisis Data .....	37
1.7 Sistematika Penulisan .....	38
<b>BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA CYBER CRIME</b>	
2.1. Bentuk Kejahatan Teknologi Informasi atau Cyber Crime .....	40
2.2. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Cyber Crime .....	48

BAB III ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM	
MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA NOMOR :	
258/PID.S/2012/PN.SBY.	
3.1 Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Pidana	
.....	48
3.2 Dasar Pertimbangan Putusan Hakim .....	60
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan .....	64
4.2 Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 258 / PID.S / 2012 /  
PN.SBY.

Lampiran 2. Kartu Bimbingan Skripsi.

Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Penelitian.

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Joko Wiratmono  
NPM : 0871010071  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 20 September 1990  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

TINJAUAN YURIDIS TENTANG CYBER CRIME  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 258/PID.S/2012/PN.SBY)

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Teknologi Informasi dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Nomor : 258/PID,S/2012/PN.SBY. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui Library Research. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur, karya tulis ilmiah, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Analisa Data menggunakan analisa kualitatif yang dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 258/PID,S/2012/PN.SBY.

Dalam kasus ini Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 20 (duapuluh) hari dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan hukuman terhadap Terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seperti barang bukti curian, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta keyakinan hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Cyber Crime sebagaimana di atur dalam Pasal 32 ayat (2) UU ITE Jo Pasal 48 ayat (2) UU ITE dan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur yang didakwakan

oleh Jaksa Penuntut Umum serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan tidak adanya alasan pemaaf sehingga hukuman diterapkan terhadap Terdakwa.

Penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa harus cukup dipertimbangkan sesuai dengan bukti-bukti yang sah, karena jika hukuman pidana yang diputuskan oleh hakim pertimbangan hukumnya kurang lengkap, maka putusannya dapat berakibat dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk itu dalam penentuan tentang adanya kesalahan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dengan minimal 2 (dua) alat bukti dan hakim yang mengadili harus yakin akan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHP. Dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim atas kesalahan Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan, maka syarat untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa telah terpenuhi.

Kata Kunci : Teknologi Infomasi, Cyber Crime, Dasar Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan.

## BAB I PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia maya semakin hari semakin meningkat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik itu di negara-negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang. Adanya perkembangan di bidang teknologi dan komunikasi jika kita kaitkan dengan pola berfikir manusia sangatlah tepat, karena manusia sebagai makhluk sosial mempunyai naluri selalu ingin tahu tentang hal-hal yang baru khususnya tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang belum diketahui dan dikenalnya, sehingga dapat membuat manusia saling berlomba-lomba untuk mengetahui dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatannya sehari-hari.

Kemajuan yang pesat di bidang teknologi informasi sudah barang tentu dapat menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung dengan cepat dan dapat meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia secara global. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menyebabkan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain maupun hubungan manusia dengan badan hukum di dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), karena dalam hubungan antar manusia maupun badan hukum baik di dalam negeri maupun di luar negeri

dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dapat disajikan dengan canggih dan cepat.

Keberadaan teknologi informasi dalam suatu kehidupan manusia di dunia sangatlah penting, baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang, karena dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi, sudah barang tentu akan dapat membuka cakrawala baru dalam suatu kehidupan manusia di dunia yang menjanjikan dapat menembus batas-batas antar negara dan dapat mempercepat penyebaran informasi maupun pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan dikalangan ilmuwan serta cendekiawan di seluruh dunia.

Seiring dengan kebutuhan masyarakat di dunia dan kemajuan teknologi informasi sudah barang tentu akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dunia berkembang dengan pesat, baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh karena :

1. Adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan lain sebagainya.
2. Memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat juga dapat memberikan kemudahan-kemudahan bagi setiap orang di dunia untuk

---

<sup>1</sup> Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 1.

berinteraksi dengan orang yang lain, baik itu tentang hal-hal yang bersifat pribadi maupun tentang transaksi bisnis dapat dilaksanakan dengan mudah, murah, praktis dan cepat serta dapat dilaksanakan kapan saja dan dimana saja melalui “Dunia Maya” tanpa harus mengeluarkan dana yang banyak dan tanpa harus ketemu dengan orangnya tujuan hidup manusia dapat tercapai sehingga dalam perkembangannya interaksi antar manusia lebih banyak menggunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, karena jika dalam interaksi antar manusia atau suatu kegiatan jika memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan sistem elektronik akan lebih efektif dan efisien serta dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya.

Sistem elektronik menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya ditulis UU ITE dinyatakan bahwa :

“Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik”.

Dari pengertian tentang sistem elektronik tersebut di atas, jelaslah sudah bahwa suatu kegiatan yang dilaksanakan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi dalam ruang lingkup yang global melalui internet dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer, merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan,



mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik. Suatu kegiatan atau interaksi antar manusia yang dilaksanakan dengan sistem elektronik tersebut dalam pengertian yang luas tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer saja, akan tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik.<sup>2</sup>

Namun demikian perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dapat menjadi pedang bermata dua, karena selain dapat memberikan kontribusi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus dapat menjadi sarana yang efektif kejahatan/perbuatan melawan hukum.<sup>3</sup> Perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui dunia maya merupakan kejahatan baru, yang dikenal dengan istilah Cyber crime. Kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet yang berbasis komputer dinamakan Cyber crime, yang modus operandinya dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi dijadikan sebagai sarana atau alat untuk memperoleh keuntungan diri sendiri dengan merugikan pihak lain.

Dalam suatu kehidupan bermasyarakat umumnya timbulnya kejahatan yang baru selalu mengikuti perkembangan dari pada masyarakat itu sendiri, yang mana semakin maju dan modern kehidupan masyarakatnya, maka jenis dan modus operandi kejahatan juga akan semakin maju dan modern sesuai dengan perkembangan zaman.

---

<sup>2</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Laksana, Yogyakarta, 2012, h. 109.

<sup>3</sup> Ibid, h. 108.

Perkembangan yang pesat dibidang teknologi informasi dan komunikasi pada umumnya dan internet pada khususnya, sudah barang tentu akan dapat memunculkan kejahatan baru, yang mana kejahatan baru tersebut dapat terjadi jika komputer dihubungkan dengan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dengan demikian kejahatannya termasuk kejahatan dunia maya. Misalnya :

1. Kejahatan memanipulasi data.
2. Spionase.
3. Sabotase.
4. Provokasi.
5. Money Laundering.
6. Pencurian software.
7. Hacking (mengakses sistem komputer tanpa izin) dan lain sebagainya.

Dengan adanya kejahatan baru dibidang teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan lahirnya hukum baru yang dikenal dengan beberapa istilah antara lain sebagai berikut :

1. Cyber Law atau hukum telematika.
2. Hukum teknologi informasi (law of information technology).
3. Hukum dunia maya (virtual world law).
4. Hukum Mayantara.<sup>4</sup>

Kejahatan baru tentang pencurian dokumen-dokumen suatu perusahaan yang disimpan secara komputerisasi melalui jaringan sistem

---

<sup>4</sup> Ibid, h. 108.

elektronik yang berbasis komputer sebagaimana contoh kasus tersebut diatas, yang mana komputer dijadikan sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan dengan cara masuk atau mengakses jaringan komputer melalui internet tanpa izin pengguna atau yang punya hak.

Untuk mengatasi adanya kejahatan baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi tersebut, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada dan jika perlu mengganti yang tidak sesuai disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jika sebelumnya ternyata tidak ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau Hukum teknologi informasi (law of information technology), maka diperlukan adanya pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baru sesuai dengan kemajuan zaman. Misalnya di Indonesia yang sebelumnya UU ITE belum ada setelah terjadinya kejahatan baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia maya, maka Indonesia mengadakan pembentukan hukum baru tentang Peraturan Perundang-undangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau yang dikenal dengan UU ITE.

Dengan lahirnya hukum baru dalam dunia maya menyebabkan timbulnya beberapa istilah hukum yang berkaitan dengan dunia Maya sebagaimana tersebut di atas, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang mana hukum telematika merupakan perwujudan dari konvergensi atau perpaduan antara hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum

informatika. Lahirnya istilah-istilah hukum tersebut berkaitan erat dengan adanya kegiatan manusia yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi dalam lingkup global melalui internet dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual.<sup>5</sup>

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat kegiatan yang dilaksanakan melalui dunia maya tidak lagi sederhana, karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara yang dapat diakses dengan mudah kapanpun dan dimanapun suatu kegiatan dilaksanakan, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri sehingga dengan demikian dapat menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*).

Dari uraian tersebut di atas, maka penulisan Sripsi ini yang relevan untuk dibahas adalah permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana Cyber crime.

## I.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Cyber Crime ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana nomor: 258/PID.S/2012/PN.SBY. ?

---

<sup>5</sup>Budi Suhariyanto, Op. Cit., h. 2.

### I.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Teknologi Informasi (cyber crime).
2. Untuk mengetahui dan menambah wawasan maupun pengetahuan tentang sistematika Hukum Acara Pidana Indonesia dalam praktiknya khususnya terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana nomor : 258/PID.S/2012/PN.SBY.

### I.4. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para mahasiswa hukum dalam rangka untuk mengetahui putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 258/PID.S/2012/PN.SBY, yang menghukum pelaku tindak pidana teknologi informasi (cyber crime) selama 20 (duapuluh) hari.

#### 2. Manfaat praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah manfaat praktis tentang perbendaharaan ilmu pengetahuan hukum dalam perkara pidana khususnya yang berhubungan dengan perkara pidana yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 258/PID.S/2012/PN.SBY yang menghukum pelaku tindak pidana teknologi informasi (cyber crime) selama 20 (duapuluh) hari.

## I.5. Kajian Pustaka

### a. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1) Pengertian Delik

Kata delik berasal dari bahasa latin *delictum* yang artinya tindak melanggar hukum, tindakan kriminal/pidana, tindak pidana.<sup>6</sup>

Menurut Sianturi istilah Delik atau tindak pidana berasal dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*” yang artinya :

- a) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum ;
- b) Peristiwa pidana ;
- c) Perbuatan pidana dan tindak pidana.<sup>7</sup>

Mengenai “*strafbaar feit*”, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".<sup>8</sup> Hal ini berarti bahwa perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi pidana bagi pelakunya adalah yang berkaitan dengan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum dan suatu yang membahayakan kepentingan hukum.

Perihal hukum pidana itu sendiri, Moeljatno mengemukakan:

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

---

<sup>6</sup>M. Dahlan Al Barry, Kamus Modern, Arkola, Jogjakarta, 1994, h. 85..

<sup>7</sup>Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986, h. 204.

<sup>8</sup>Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan ke lima, Rineka cipta, Jakarta, 1993, h. 54.

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan-larangan tersebut ;
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan ;
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan-larangan tersebut.<sup>9</sup>

Apabila diperhatikan pendapat Moeljatno di atas, dapat dijelaskan bahwa perbuatan pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana, karena hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan.

Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatannya, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Sedangkan ancaman pidananya atau sanksinya ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang biasanya disebut dengan perkataan "barangsiapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum.

---

<sup>9</sup>Ibid., h. 1.

Dari uraian pengertian tentang delik tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan delik adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman atau sanksi, karena perbuatannya merupakan pelanggaran terhadap hukum positif atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rumusan delik dalam ilmu hukum pidana terdapat 2 (dua) jenis yaitu :

- a) Delik Formil yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>10</sup>

Misalnya tentang pencurian sebagaimana disebutkan didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya ditulis KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Dari bunyi Pasal 362 KUHP tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang ada didalam pencurian adalah :

- 1) Barang siapa ;
- 2) Mengambil ;
- 3) Sesuatu barang ;
- 4) Barang yang diambil kepunyaan orang lain ;

---

<sup>10</sup>Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Cetak ke lima, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 8.



- 5) Tujuan perbuatannya dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum.

Perbuatan mencuri barang kepunyaan orang lain secara yuridis formal dapat dikatakan telah selesai jika barang yang diambil telah berpindah tempat.

- b) Delik Materiil yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang yang berlaku.<sup>11</sup>

Misalnya tentang pencurian Dokumen Elektronik sebagaimana disebutkan didalam Pasal 32 ayat (2) UU ITE yang bunyinya :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.”

Dari bunyi Pasal 32 ayat (2) UU ITE tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang ada didalam pencurian dokumen elektronik adalah :

- 1) Setiap orang ;
- 2) Sengaja ;
- 3) Tanpa hak atau melawan hukum ;
- 4) Memindahkan atau mentransfer informasi elektronik (dokumen);
- 5) Sistem elektronik orang lain yang tidak berhak ;

---

<sup>11</sup>Ibid, h. 8.

Dalam peristiwa pencurian dokumen elektronik yang perlu dibuktikan adalah perbuatan yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian, yang mana kerugiannya memang disengaja oleh pelaku dan perbuatannya dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain.

## 2) Unsur-Unsur Delik

Unsur-unsur delik menurut doktrin terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

### a) Unsur subjektif.

Unsur Subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana.<sup>12</sup>

Dalam asas hukum pidana dinyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or *actus non facit reum nisi mens sit rea*).

Bahwa salah satu syarat seseorang dapat dikenakan sanksi pidana jika yang bersangkutan telah melakukan kesalahan yang disengaja (*intention/opzet/dolus*) dan karena kealpaan (*negligence or schuld*) mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Untuk menentukan akibat yang ditimbulkan karena kesalahan yang disengaja dan kealpaannya merupakan peristiwa pidana atau bukan, maka akibat

---

<sup>12</sup>Ibid, h. 9.

perbuatan yang ditimbulkan harus bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.<sup>13</sup> Misalnya :

(1) Perbuatan bersifat melawan hukum.

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu melawan hukum apa tidak, maka perbuatan yang telah dilakukan harus bersifat melawan hukum yang tertulis atau melanggar hukum positif yang berlaku.

Sebagai contoh seseorang melakukan pencurian dokumen elektronik atau mentransfer informasi elektronik milik orang lain yang tanpa hak, perbuatan tersebut sudah dapat dipastikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum positif atau hukum yang berlaku dengan sengaja sebagaimana disebutkan didalam Pasal 32 ayat (2) UU ITE.

(2) Dapat di cela.

Suatu perbuatan yang telah dilakukan harus memenuhi unsur delik yang tertulis atau bersifat melawan hukum positif yang ada (KUHP) dan perbuatannya dapat dicela.<sup>14</sup>

b) Unsur objektif.

Unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri pelaku tindak pidana terdiri dari :<sup>15</sup>

(1) Perbuatan Manusia berupa :

---

<sup>13</sup>D. Schaffmeister, D. Keijzer dan E.PH. Sutorius, Terjemahan, J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Hukum Pidana, Cetakan kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 26.

<sup>14</sup>Ibid, h. 26.

<sup>15</sup>Leden Marpaung, Op. Cit., h. 9.

- (a) Act yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif ;
- (b) Omission yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

(2) Akibat (result) perbuatan manusia.

Akibat dari perbuatan manusia yang dapat membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.

Misalnya : nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik. Kehormatan dan lain sebagainya.

(3) Keadaan-keadaan (circumstances).

Keadaan terjadinya peristiwa pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- (a) Keadaan pada saat perbuatan pidana terjadi atau dilakukan.
- (b) Keadaan setelah terjadinya perbuatan pidana dilakukan.

(4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum ini berkenaan dengan alasan-alasan yang dapat membebaskan pelaku dari hukuman, sedangkan sifat melawan hukumnya adalah apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum positif dan pelakunya dapat dikenakan sanksi atau hukuman.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Ibid, h. 10.

### 3) Pengertian Kesengajaan atau Dolus

Pengertian Kesengajaan menurut *Criminele Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang diberlakukan di Indonesia pada penjajahan Belanda pada tahun 1915 dinyatakan bahwa :

“Kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*).”<sup>17</sup>

Mengenai pengertian kesengajaan Profesor Satochid Kartanegara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah :<sup>18</sup>

“Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.”

Menurut teori kehendak yang dikemukakan oleh Von Hippel dinyatakan bahwa :

“Pengertian tentang Kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.”<sup>19</sup>

Dari beberapa pengertian tentang kesengajaan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya sudah dapat diduga

---

<sup>17</sup>Ibid, h. 13.

<sup>18</sup>Ibid, h. 14.

<sup>19</sup>Ibid, h. 13.

bahwa pelaku memang benar-benar menghendaki dan mengerti tentang akibat-akibat dari perbuatannya bersifat melawan hukum positif yang ada dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman, karena melanggar ketertiban umum atau norma-norma kesusilaan. Sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku merupakan pelaksanaan dari kehendak (de wil), yang mana kehendaknya ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang.

#### 4) Bentuk-bentuk Kesengajaan (Opzet or Intention)

Bentuk-bentuk kesengajaan secara umum terbagi menjadi 7 (tujuh) bentuk kesengajaan (opzet) yaitu :

##### a) Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk).

Kesengajaan sebagai maksud adalah kehendak pelaku tindak pidana untuk melakukan perbuatan pidana atau mencapai akibat yang menjadi pokok alasan.

Misalnya : A bermaksud membunuh B yang telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya.

##### b) Kesengajaan dengan keinsyafan Pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn).

Pelaku (doer or dader) tindak pidana mengetahui pasti dan menyadari bahwa jika perbuatannya dilakukan akan menimbulkan akibat lain.

Misalnya : A berkehendak untuk membunuh B dengan senjata api, akan tetapi C mencegah A agar tidak melakukan pembunuhan dengan cara berdiri didepan B dan A tahu akibatnya kalau tetap melepaskan

tembakan dalam jarak dekat peluru dapat menembus selanjutnya mengenai B dapat menyebabkan C dan B meninggal. Dalam penembakan tersebut pertama-tama peluru mengenai C dan kemudian B sehingga menyebabkan B dan C meninggal.

Dalam contoh ini kesengajaan A melakukan pembunuhan terhadap B adalah kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), sedangkan terhadap C adalah kesengajaan dengan keinsyafan pasti.

c) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (Dolus Eventualis).

Menurut Profesor Bemmelen yang dikutip oleh Leden Marpaung menjelaskan bahwa :<sup>20</sup>

Kesengajaan Dengan Keinsyafan Kemungkinan (Dolus Eventualis) adalah kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan. Artinya tidak pernah lebih banyak dikehendaki kemungkinan matinya orang lain, tidak dapat dikatakan bahwa menghendaki supaya orang itu mati. Tetapi jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran bahwa perbuatannya akan dapat menyebabkan matinya orang lain, hal itu menunjukkan bahwa ia memang menghendaki kematian orang itu.

Sedangkan Lamintang menjelaskan bahwa Kesengajaan Dengan Keinsyafan Kemungkinan (Dolus Eventualis) sebagai berikut :

Pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatannya untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Jadi, jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Ibid, h. 18.

<sup>21</sup>Ibid, h. 18.

Dari kedua penjelasan tentang Kesengajaan Dengan Keinsyafan Kemungkinan (Dolus Eventualis) sebagaimana disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa jika pelaku menyadari tentang akibat-akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan hukuman atau sanksi, akan tetapi pelaku tetap melaksanakan perbuatannya, maka pelaku dapat dipersalahkan dan dituntut dengan sengaja telah melakukan perbuatan pidana, walaupun akibat dari perbuatannya tidak dikehendaki. Kesengajaan dari akibat yang ditimbulkan dalam perbuatan tersebut merupakan jenis kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan, karena akibat dari perbuatannya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejadian ini umumnya dilakukan oleh pelaku, karena pelaku memilih lebih baik menanggung resiko adanya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendakinya, asal tujuannya tercapai dari pada sama sekali tidak berbuat.<sup>22</sup>

Misalnya : A dan B kegemarannya kebut-kebutan sepeda motor dijalan raya, pada saat yang bersamaan dijalan yang sama sedang ada kegiatan anak-anak SD latihan PBB, akan tetapi A dan B tetap melaksanakan kegemarannya dan tidak menghentikan kegemarannya untuk sementara waktu demi keamanan dan keselamatan anak-anak SD yang sedang berlatih PBB. Jika dalam kebut-kebutan tersebut A dan B menabrak salah satu anak SD yang sedang belajar PBB tersebut

---

<sup>22</sup>R. Tresna, Azas-Azas Hukum Pidana, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, h. 59.



sampai meninggal, maka perbuatan A dan B dapat dipersalahkan dan dituntut dengan sengaja telah menyebabkan matinya orang.

d) Dolus determinatus dan dolus indeterminatus.

Dalam Dolus Determinatus perbuatan pidananya dilakukan oleh pelaku apabila yang hendak dijadikan korban perbuatan disengaja sudah pasti tentang orangnya.

Misalnya : A balas dendam dengan B yang telah membunuh orang tuanya dengan cara membunuh B pada saat berada diteras rumahnya.

Sedangkan Dolus Indeterminatus perbuatannya dilakukan oleh pelaku dengan sengaja, akan tetapi pelaku tidak memperdulikan siapa saja yang menjadi korban atas perbuatannya itu, yang penting tujuannya tercapai.

Misalnya : A mengirim kue tart beracun ke rumah B dengan tujuan untuk membunuh B dan dirumah tersebut yang tinggal selain B juga C (isteri B) dan D (anak B dan C). A sadar bahwa ada kemungkinan C dan D yang tidak bersalah juga akan mati setelah makan kue beracun tersebut, akan tetapi A tetap mengirimkannya.

e) Dolus alternatives dan dolus generalis.

Dalam Dolus Alternatives perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja mempunyai maksud yang bercabang atau korbannya lebih dari 1 (satu) orang.

Misalnya : A bermaksud membalas dendam kepada B dan C (suami isteri) yang telah menghina dirinya didepan umum dengan cara

melakukan pemukulan dengan kayu balok dari belakang pada saat B dan C lewat jalan didepan rumahnya dan akibat perbuatannya tersebut kedua korban luka parah pada kepalanya.

Sedangkan Dolus Generalis perbuatannya ditujukan secara umum atau orang banyak.<sup>23</sup>

Misalnya : A anggota jaringan teroris bermaksud membunuh orang asing yang sedang berjoget di diskotik dengan cara melemparkan, granat ditengah-tengah orang asing tersebut sehingga menimbulkan korban banyak orang baik itu orang asing maupun pribumi.

f) Dolus premeditatus.

Perbuatan disengaja dalam Dolus Premeditatus sifatnya lebih berat, karena perbuatannya yang dilakukan dengan sengaja setelah dipikirkan dan direncanakan terlebih dahulu.

g) Weberse dolus generalis.

Perbuatan pidana yang disengaja dalam Weberse Dolus Generalis dimaksudkan untuk membunuh korban dengan cara menembak, akan tetapi korban hanya pingsan, tidak meninggal dunia. Selanjutnya oleh karena pelaku mengira bahwa korban telah meninggal dunia, maka korban dijatuhkan ke sungai sehingga korban meninggal karena tenggelam. Dalam hal terjadi demikian, maka pelaku tidak dapat dipersalahkan telah membunuh korban dengan cara menenggelamkan korban ke dalam sungai, karena pelaku bermaksud membunuh korban

---

<sup>23</sup>Ibid, h. 59.

dengan cara ditembak dan pada saat itu pelaku mengira bahwa korban telah meninggal.

## b. Tinjauan Umum Tentang Cyber Crime

### 1) Pengertian Cyber Crime

- a) Pengertian Cyber crime menurut Budi Suhariyanto, dalam bukunya berjudul Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) dinyatakan bahwa:

“Cyber crime adalah kejahatan teknologi informasi”.<sup>24</sup>

Dari definisi tersebut Budi Suhariyanto menjelaskan bahwa pada dasarnya Cyber crime meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi dan sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya.

- b) Pengertian Cyber crime menurut Tb. Ronny R. Nitibaskara yang dikutip oleh Profesor Widodo menyatakan bahwa :

“Cyber crime adalah kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan computer didalam internet”.<sup>25</sup>

Dalam definisi tersebut dijelaskan bahwa Cyber crime juga dapat disebut kejahatan yang berhubungan dengan komputer (computer-related crime), yang mencakup 2 kategori kejahatan yaitu:

---

<sup>24</sup> Ibid., h. 11.

<sup>25</sup> Widodo, Sistem Pidana dalam Cybercrime, .CV. Aswaja Pressindo Jogjakarta, 2009, h. 23.

- (1) Kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat.
  - (2) Komputer dijadikan sebagai sasaran atau objek kejahatan.
- c) Pengertian Cyber crime menurut Dikdik M. Arief Mansur, dinyatakan bahwa Cyber crime adalah :

“Upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan computer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.”<sup>26</sup>

Menurut Didik M. Arief Mansur bahwa seseorang yang menggunakan komputer atau bagian dari jaringan komputer tanpa seijin yang berhak, tindakan tersebut sudah tergolong pada kejahatan komputer.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Cyber crime merupakan suatu kejahatan baru yang berhubungan dengan Teknologi informasi atau dunia maya (cyber), yang mana kejahatannya dilakukan melalui sistim elektronik dengan jaringan internet yang berbasis komputer dan komputer dijadikan sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan.

Perbedaan pendapat para sarjana tentang pengertian Cyber crime atau definisi dari kejahatan komputer, karena pada awalnya ahli hukum terfokus pada alat/perangkat keras yaitu komputer. Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan

---

<sup>26</sup> Dikdik M. Arief Mansur, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 8.

internet, maka fokus dari identifikasi terhadap definisi Cyber crime diperluas lagi menjadi seluas aktivitas yang dapat dilakukan didunia maya/cyber melalui sistim informasi yang digunakan. Jadi pengertian cyber crime tidak sekedar pada komponen hardwarenya saja kejahatan tersebut dimaknai sebagai cyber crime, akan tetapi sudah dapat diperluas dalam lingkup dunia yang dijelajah oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian cyber crime dapat dikatakan bahwa kejahatannya sudah meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi dan komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran informasi kepada pihak lainnya.<sup>27</sup>

## 2) Unsur-unsur Cyber Crime

Unsur-unsur tindak pidana teknologi informasi atau Cyber Crime khususnya tentang pencurian dokumen elektronik yang ada didalam Pasal 32 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut :

- a) Setiap orang ;
- b) Sengaja;
- c) Tanpa hak atau melawan hukum ;
- d) Memindahkan atau mentransfer informasi elektronik (dokumen) ;
- e) Sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

---

<sup>27</sup> Budi Suhariyanto, Op. Cit. h. 11.

### 3) Subjek Hukum Cyber Crime

Subjek Hukum Cyber crime diatur di dalam Pasal 1 angka 18 dan angka 19 UU ITE dinyatakan bahwa :

- a) Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- b) Penerima adalah subjek hukum yang menerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari pengirim.

Subjek hukum dalam kejahatan yang dilakukan melalui jaringan sistem elektronik yang berbasis komputer adalah manusia. badan hukum maupun badan usaha.

### 4) Objek Hukum Cyber Crime

Objek Hukum cyber crime diatur di dalam :

- a) Pasal 1 angka 14 UU ITE dinyatakan bahwa :

“Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetic, optic, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmetika, dan penyimpanan”.

- b) Pasal 1 angka 4 UU ITE dinyatakan bahwa :

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektomagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar, melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh yang mampu memahaminya.

Objek dari pada kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya atau melalui jaringan sistem elektronik yang berbasis komputer adalah komputer itu sendiri dan dokumen elektronik yang tersimpan didalamnya secara komputerisasi, karena kejahatannya dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarana atau alat dan komputer dijadikan sebagai sasaran untuk melakukan kejahatan dengan cara masuk atau mengakses jaringan komputer tanpa izin.

#### 5) Karakteristik Cyber Crime

Cyber crime memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut :

- a) Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/cyber space, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi Negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b) Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
- c) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.

e) Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional melintasi batas Negara.<sup>28</sup>

Misalnya : Nomor PIN ATM, Cacat atau Penyakit seseorang yang tersembunyi dan lain sebagainya.

### c. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam pertanggungjawaban pidana umumnya ditujukan kepada tindakan pelaku tindak pidana, jika pelaku telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang, yang berarti bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terjadi jika pelaku telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana karena telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.<sup>29</sup>

Pelaku tindak pidana dalam hal ini disebut sebagai barangsiapa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya ditulis KUHP yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atas martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang

---

<sup>28</sup> Ibid, h. 14.

<sup>29</sup> Kanter dan Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, AHM-PTHM, Jakarta, 1982, h. 249.



diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP mempunyai konsekuensi hukum masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Masing-masing melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan kepada pelakunya dapat diancam dengan pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan atau pidana pokok saja. Meskipun demikian tidak semua orang yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang, akan dikenakan sanksi berupa pidana, melainkan harus dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena jika ternyata pelaku tidak mampu bertanggung jawab tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pembuat perbuatan pidana (dader) baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran atas delik. Menurut Moeljatno dikemukakan sebagai berikut:

Kejahatan atau “*rechtsdelicten*” adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran atau “*wetsdeliktern*” yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.<sup>30</sup>

Perihal pertanggungjawaban pidana maksudnya pelaku tindak pidana dapat pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan pelaku dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Apabila pelaku tidak

---

<sup>30</sup>Moeljatno, Op. Cit., h. 71.

memenuhi salah satu unsur yang didakwakan, maka tidak dapat dipidana.

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- 1) Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
- 2) Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan;
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>31</sup>

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum “wederrechtelijkheid” sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Jika sifat melawan hukum perbuatan pidana tersebut tidak dilakukan, maka menurut Vos, Jonkers dan Langemeyer dikutip dari bukunya Moeljatno dalam hal ini harus dilepas dari tuntutan hukum (onstlag van recht-vervolging).<sup>32</sup>

Sifat melawan hukum dari tindak pidana yang terdapat pada KUHP merumuskan delik tersebut secara tertulis dan juga tidak tertulis. Jika rumusan delik tidak mencantumkan adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana, maka unsur delik tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika pelaku perbuatan dapat membuktikan tidak adanya sifat melawan hukum tersebut.<sup>33</sup>

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur yang diwajibkan guna memenuhi pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggungjawab adalah:

---

<sup>31</sup>Ibid., h. 164.

<sup>32</sup>Ibid., h. 134-135.

<sup>33</sup>Ibid., h. 134.

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>34</sup>

Setiap pelaku tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada umumnya :

- 1) Keadaan jiwanya :
  - a) Tidak terganggu oleh penyakit yang terus menerus atau sementara (temporer) ;
  - b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya) dan;
  - c) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengingau karena demam, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- 2) Kemampuan jiwanya :
  - a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
  - b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan
  - c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>35</sup>

Sedangkan batasan-batasan mengenai pembuat perbuatan pidana (dader) yang dianggap tidak mampu bertanggungjawab menurut KUHP adalah :

---

<sup>34</sup>Ibid., h. 165.

<sup>35</sup>Kanter dan Sianturi, Op. Cit. h. 251.

- 1) Kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP);
- 2) Anak yang belum dewasa (pasal 45 KUHP).

Dengan dasar ketentuan KUHP tersebut diatas, maka pembuat perbuatan pidana (dader) tidak termasuk mempunyai pertanggung jawaban pidana dalam melakukan perbuatan pidana.

Menurut Moeljatno, perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan jika :

Orang dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian ....<sup>36</sup>

Sedangkan menurut Simon sebagaimana dikutip dari bukunya Moeljatno, kesalahan adalah “keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat tercela karena melakukan perbuatan tadi”.<sup>37</sup>

Bentuk perbuatan manusia mempunyai kesalahan terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa). Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak, yaitu:

---

<sup>36</sup>Moeljatno, Op. cit., h. 157.

<sup>37</sup>Ibid., h. 168.

- 1) Kesengajaan dengan maksud (*dolus derictus*);
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).<sup>38</sup>

Kealpaan yang harus terjadi pada perbuatan menurut Van Hamel harus mengandung 2 (dua) syarat, yaitu :

- 1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan dalam hukum;
- 2) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Kata kesalahan pada kealpaan pengertiannya sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- 1) Pembuat berbuat lain dari pada seharusnya dia berbuat menurut aturan hukum tertulis dan tidak tertulis. Jadi dia berbuat melawan hukum;
- 2) Selanjutnya pembuat laku berbuat sembrono, lalai, kurang berfikir, lengah;
- 3) Akhirnya pembuat dapat dicela, yang berarti bahwa dia dapat di pertang-gungakibatnya atas perbuatan yang sembrono, lalai, kurang berfikir dan lengah.<sup>39</sup>

Pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dibatalkan demi hukum jika terdapat alasan pemaaf atau “*verontschuldigingsgrond*”. Yang dimaksud dengan alasan pemaaf menurut teori hukum adalah alasan yang menghapus kesalahan. Menurut Moeljatno kalau ada alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan (alasan pemaaf), maka masih ada perbuatan pidana, tetapi pelaku tidak dipidana (tidak dapat dipertanggungjawabkan). Dampak yang terjadi akibat adanya alasan pemaaf bagi seseorang yang melakukan perbuatan pidana adalah

---

<sup>38</sup>Ibid, h. 167.

<sup>39</sup>Ibid. h. 201.

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

## 1.6. Metodologi Penelitian

### a. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yang ada kaitannya dengan tindak pidana teknologi informasi (cyber crime).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang dikaitkan dengan objek penelitian yang penulis kaji yaitu tindak pidana teknologi informasi (cyber crime).

### b. Sumber Bahan Hukum dan/atau Data

Sumber data untuk Proposal ini adalah data sekunder yakni data tertulis yang tersedia di perpustakaan serta bahan tertulis dalam bentuk putusan. Dengan berpangkal tolak dari tipe penelitian ini maka agar Proposal ini dapat bernilai ilmiah, maka bahan/sumber hukum yang digunakan, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU ITE dan KUHP yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur yang mempunyai sangkut paut dengan hukum pidana, tulisan-tulisan ilmiah, bahan-bahan kuliah, surat kabar dan dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang erat hubungannya dengan Cyber crime.
- 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup :
  - a) Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Misalnya : Kamus, Ensiklopedia dan lain sebagainya.
  - b) Bahan-bahan primer, sekunder dan tersier atau penunjang di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian. Misalnya yang berasal dari bidang : Filsafat, Ekologi, Teknik dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

#### c. Pengumpulan Bahan Hukum dan/atau Data

Pengumpulan data sekunder adalah dengan menggunakan studi pustaka atau studi dokumen dari bahan-bahan pustaka. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan studi dokumen adalah dengan melakukan analisis isi (content analysis). Content analysis adalah teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi

---

<sup>40</sup>Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 185.

secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam tulisan atau dokumen.

Pengolahan, analisa dan konstruksi data dapat dilakukan secara kualitatif dan atau kuantitatif. Penyajian hasil penelitian (sebagai hasil pengolahan data) bisa disatukan maupun dipisahkan dengan analisa data. Apabila dipisahkan, maka penyajian hasil penelitian sifatnya semata-mata deskriptif. Tidak benar bila dikatakan bahwa pengolahan, analisis dan konstruksi data sekunder dilakukan dengan kualitatif belaka, sedangkan pengolahan, analisis dan konstruksi data primer dilakukan dengan kuantitatif belaka. Hal ini disebabkan oleh karena pada hakekatnya pengolahan, analisa dan konstruksi data secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan dua cara yang saling melengkapi. Pada penelitian hukum yuridis normatif yang menelaah data sekunder, penyajian data dilakukan sekaligus dengan hasil datanya..<sup>41</sup>

Oleh karena itu dalam Skripsi ini penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yang mana penulis menyatukan data yang diperoleh dengan hasil analisisnya yang dikaitkan dengan kasus yang penulis angkat dalam Skripsi ini. Hal ini menyebabkan Skripsi ini menjadi suatu kesatuan yang padu dan tidak hanya bersifat deskriptif belaka.

---

<sup>41</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, h. 68-69.



#### d. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kritis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sistematis dan teratur untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji. <sup>42</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, kemudian mencari teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, selanjutnya baru ditarik kesimpulannya guna untuk menentukan hasilnya. Hasil dari analisis data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menentukan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data-data yang diperoleh.

#### I.7. Sistematika Penulisan

Agar supaya dapat memberikan gambaran uraian yang tepat dan teratur, maka Skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab. Untuk jelasnya gambaran mengenai Skripsi ini dapat dilihat pada sistematika yang antara lain sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan, yang mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan Skripsi. Pada bab ini berisikan sebagai landasan berpijak untuk pembahasan pada bab berikutnya. Penjabaran landasan berpijak permasalahan diawali dengan sub bab latar belakang permasalahan. Dengan

---

<sup>42</sup>Ibid, h. 32.

latar belakang masalah ini akan diketahui permasalahan yang dikaji, yang diletakkan pada rumusan masalah. Pembahasan dalam Skripsi ini sudah barang tentu ada hal-hal yang diharapkan yang akan dituangkan dalam tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Dalam pelaksanaannya agar sesuai dengan dasar penyusunan karya ilmiah, maka akan disajikan cara-cara penulisan ilmiah dalam metode penelitian dengan harapan agar isi Skripsi dapat diketahui lebih awal sehingga diperlukan penyusunan secara sistematis. Untuk itu perlu disusun kerangka penyusunan yang dituangkan dalam sistematika penulisan.

Bab Kedua Dalam bab ini membahas tentang bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana teknologi informasi yang disajikan dalam bentuk uraian secara teoritis. Sub bab terdiri dari Bentuk kejahatan teknologi informasi atau cyber crime. Sub bab berikutnya Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana teknologi informasi.

Bab Ketiga Untuk menunjang agar hasil penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan adanya Analisis Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pidana nomor: 258/PID.S/2012/PN.SBY. yang menghukum pelaku tindak pidana selama 20 (duapuluh) hari yang disajikan dalam bentuk uraian secara teoritis, sub bab terdiri dari Dasar Pertimbangan Putusan hukuman dan sub bab berikutnya tentang Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pidana.

Bab Empat Penutup yang mengakiri uraian dan pembahasan, sub babnya terdiri dari kesimpulan dan saran.